



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Tahun
2024

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gowa**

**Jalan Mesjid Raya No. 38 Sungguminasa
Telepon/Fax : (0411) 8982084;
E-mail : dpmptspgowa@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2024 dapat disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang wajib disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BABI. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penyusunan.....	4
BABII. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BABIII. TUJUAN, SASARAN PADA PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD.....	44
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT KERJA	47
BAB V. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

- Tabel T-C.29 : Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022**
- Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa**
- Tabel T-C.31 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gowa**
- Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Gowa**
- Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai salah satu pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Renja SKPD menjembatangi antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategi jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Penanaman Modal berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa serta berpedoman kepada RKPD, Renstra DPMPTSP, dan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

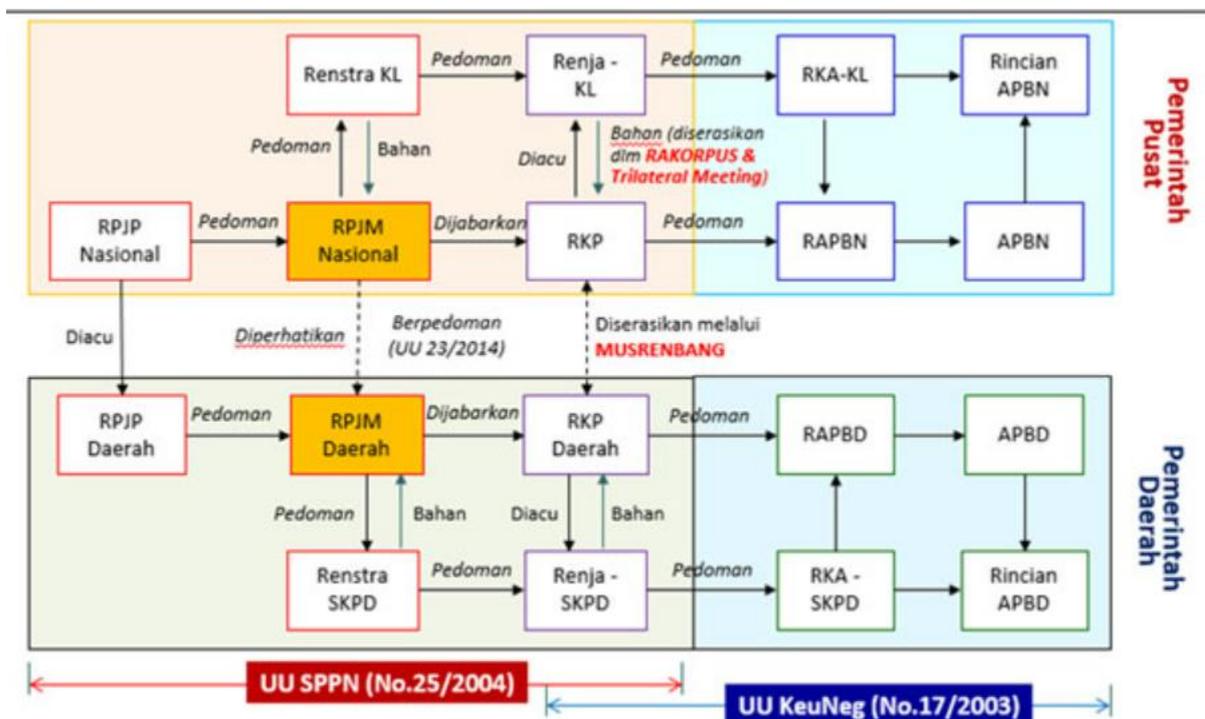
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan

- pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju
3. Penyusunan Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun
 4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.

Renja DPMPTSP dengan dokumen RKPD dan Renstra DPMPTSP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja DPMPTSP merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra DPMPTSP dan RKPD. Selain itu, Renja juga merupakan pedoman bagi penyusunan rencana anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2024. Skema hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

Bagan I.1

Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 terutama yang terkait dengan urusan penanaman modal.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2024 terdiri dari Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa tahun 2024. Bab II merupakan Bab Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Tahun Lalu, yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat. Bab III merupakan Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Bab IV merupakan Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Bab V merupakan Bab Penutup, yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja DPMPTSP Kab. Gowa. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP Kab. Gowa berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Gowa tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab.Gowa tahun lalu, dan realisasi Renstra DPMPTSP Kab.Gowa mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang antara lain memuat :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Ralisasi program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
2	1	2	2.0	0					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	2	2.0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal (Dokumen)	1		1	0	0.00	1	1	100
2	1	2	2.0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah (Kegiatan Usaha)	9		0	0	0.00	3	3	33
2	1	2	2.0		<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase potensi pengembangan penanaman modal yang dipetakan (%)</i>	100		100	100	100.00	100	100	100
2	1	2	2.0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1	0	0.00	1	1	100
2	1	2	2.0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota (Dokumen)	1		1	1	100.00	1	1	100
2	1	3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaku investasi sektor unggulan (Orang)	65		45	0	0.00	50	50	77
2	1	3	2.0		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan (Kegiatan)</i>	3		3	0	0.00	3	3	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1	2	3	2.0	0					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1	0	0.00	1	1	100
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1	0	0.00	1	1	25
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan (%)	95		95	94	98.95	95	95	100
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
2	18	4	2.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan (Dokumen)</i>	<i>70,000</i>		<i>12,000</i>	<i>7240</i>	<i>60.33</i>	<i>13000</i>	<i>20240</i>	<i>29</i>
						<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (Aduan)</i>	<i>90</i>		<i>22</i>	<i>7</i>	<i>31.82</i>	<i>20</i>	<i>27</i>	<i>30</i>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
2	1	4	2.0	0					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	4	2.0	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha (Pelaku Usaha)	73,500		12,600	7695	61.07	13650	21345	29
2	1	4	2.0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal (Kegiatan Usaha)	70,000		12,000	0	0.00	13000	13000	19
2	1	4	2.0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan (Orang)	90		22	7	31.82	20	27	30
2	1	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal (%)	100		94	93	98.94	96	96	96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 1 8 5 2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Perusahaan)	55		35	84	240.00	40	124	225
2 1 8 5 2.0 1 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)	55		35	0	0.00	40	40	73
2 1 8 5 2.0 1 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Pelaku Usaha)	520		240	240	100.00	90	330	63
2 1 8 5 2.0 1 0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (Kegiatan Usaha)	55		55	90	163.64	40	130	236
2 1 8 6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid (%)	100		100	0	0.00	100	100	100
2 1 8 6 2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data dan informasi (Dokumen)	10		2	0	0.00	2	2	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
2	1	6	2.0	0					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
2	1	6	2.0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan (Dokumen)	10		2	0	0.00	2	2	20
		1			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
		1	2.0		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja (%)</i>	100		100	100	100.00	100	100	100
		1	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	30		4	4	100.00	6	10	33
		1	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	65		13	13	100.00	13	26	40
		1	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10		2	2	100.00	2	4	40

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	140		28	28	100.00	28	56	40
	1 2.0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD (Laporan)	65		13	13	100.00	13	26	40
	1 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi barang milik daerah (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 3 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	70		14	14	100.00	14	28	40
	1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 5 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	205		38	38	100.00	82	120	59

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	1 2.0 5 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	380		120	0	0.00	120	120	32
	1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	80		16	16	100.00	16	32	40
	1 2.0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	15		3	0	0.00	3	3	20
	1 2.0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	60		12	12	100.00	12	24	40
	1 2.0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	60		12	12	100.00	12	24	40
	1 2.0 6 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1	1	100.00	1	2	40

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026	Realisas i Kinerja tahun 2021 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2)	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisas i (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 7 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	16		3	1	33.33	0	1	6
	1 2.0 7 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	60		15	0	0.00	20	20	33
	1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	60		12	12	100.00	12	24	40
	1 2.0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	60		12	12	100.00	12	24	40
	1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (%)	100		100	100	100.00	100	100	100
	1 2.0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	15		3	3	100.00	3	6	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		1 2.0 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	76		16	3	18.75	15	18	24
		1 2.0 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	5		1	0	0.00	1	1	20

Berdasarkan Tabel T-C.29. dapat dijelaskan point-point sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 berdasarkan tabel T-C.29. tersebut di atas adalah :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Realisasi program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 berdasarkan tabel T-C.29. tersebut di atas adalah :
- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Ralisasi program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 berdasarkan tabel T-C.29. tersebut di atas adalah :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja peningkatan jumlah investor sebesar 44% dan realisasi mencapai 64%.
- b. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 22 aduan dan realisasi mencapai 7 aduan.
- c. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 35 perusahaan dan realisasi mencapai 84 perusahaan.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sebanyak 55 kegiatan usaha dan realisasi mencapai 90 kegiatan usaha.

4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Terdapat beberapa faktor penyebab kinerja program/kegiatan/subkegiatan tidak tercapai, terpenuhi ataupun melebihi target yang ditetapkan.

- a. Program/kegiatan/subkegiatan telah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
- b. Masih kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui LKPM sehingga berdampak pada pencapaian nilai realisasi penanaman modal di Kabupaten Gowa.
- c. Peralihan sistem dari OSS 1.1 menjadi OSS RBA, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih

menjadi barang baru bagi sebagian masyarakat sehingga masih banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak mengerti cara pemanfaatan sistem tersebut, yang berdampak pada menurunnya jumlah pemohon izin.

- d. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan pengisian pelaporan LKPM dan pengajuan izin di OSS RBA.
 - e. Adanya komitmen aparat DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
 - f. Masih kurangnya sumber daya manusia pada DPMPTSP baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - g. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pegawai.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Capaian program Renstra DPMPTSP yang dilaksanakan pada tahun 2022 berpengaruh pada capaian sasaran DPMPTSP pada tahun tersebut. Sasaran DPMPTSP “Meningkatnya realisasi penanaman modal” dengan indikator capaian kinerja “persentase peningkatan investasi” memiliki target 1% pada tahun 2022, namun data olahan sementara yang bersumber dari data sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menunjukkan bahwa peningkatan investasi di Kabupaten Gowa hanya mencapai -0.16%.

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari identifikasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Adapun perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa :

- Arah Kebijakan
Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa adalah :
 - a. Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi
 - b. Mengikuti pameran potensi dan peluang investasi daerah
 - c. Menyusun regulasi/insentif/kebijakan daerah yang dapat meningkatkan iklim penanaman modal
 - d. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
 - e. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal
 - f. Menyediakan Mal Pelayanan Publik
 - g. Menyediakan data dan informasi yang valid dan kredibel
- Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Melaksanakan kebijakan bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pedoman yang berlaku bahan penyempurnaan perumusan kebijakan;
- h. Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Memvalidasi rumusan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- k. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- m. Mengkoordinasi pelayanan perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan

- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa melaksanakan pelayanan dengan tujuan **Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah** dengan indikator capaian kinerja **Persentase Nilai Investasi terhadap PDRB**, yang difokuskan pada sasaran kinerja **Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal** dengan indikator capaian kinerja **Persentase Peningkatan Investasi**.

Pada tahun 2022, **realisasi investasi** sebesar Rp 5.420.778.835.062,-. Data realisasi ini masih bersifat sementara karena masih ada pelaku usaha yang belum melaporkan pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya untuk pelaporan LKPM semester II Tahun 2022. Jika disandingkan dengan realisasi investasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya, realisasi investasi pada tahun 2022 mengalami penurunan. Tahun 2020 realisasi investasi sebesar Rp 4.602.657.814.081,-, Tahun 2021 sebesar Rp 8.008.088.688.594,-. Sehingga **persentase peningkatan investasi** di tahun 2020 sebesar 224,71%, di tahun 2021 sebesar 73,99%, dan di tahun 2022 menurun -32%.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan											
1	Persentase nilai investasi terhadap PDRB (%)	Tidak Ada		7 - 8	7 - 8	8 - 9	8 - 9	Data belum tersedia	7 - 8	8 - 9	8 - 9	
	Indikator Sasaran											
2	Persentase peningkatan investasi (%)		1	5	5	5	-0.16	5	5	5	Data realisasi capaian renstra tahun 2022 masih data sementara karena masih ada investor yang belum melaporkan LKPM semester II tahun 2022	
			Indikator Outcome									

3		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	1	5	5	5	-0.16	5	5	5	Data realisasi capaian renstra tahun 2022 masih data sementara karena masih ada investor yang belum melaporkan LKPM semester II tahun 2022
		Indikator Output									
4		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Investor)	Target indikator output berdasarkan Permendagri 86/2017 tidak tercantum dalam dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2021 - 2026, namun realisasinya dapat diketahui karena merupakan bagian dari perhitungan pencapaian target sasaran dan program SKPD								
5		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)									
6		Rasio daya serap tenaga kerja									
7		Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)									

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan DPM-PTSP, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi DPM-PTSP. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan DPM-PTSP.

Faktor Internal DPM-PTSP :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang	1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas
2. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non Perizinan dan penanaman modal	2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas
3. Adanya kemauan yang kuat dari aparaturnya DPM-PTSP untuk maju	3. Sarana dan prasarana pelayanan Perizinan yang masih terbatas
4. Perizinan yang telah memanfaatkan sistem online melalui OSS RBA dan sicanik sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan izinnya di mana pun dan kapan pun	4. Sistem online kadang terkendala oleh jaringan dan pada waktu-waktu tertentu tidak dapat diakses karena adanya maintenance sistem

Faktor eksternal DPM-PTSP :

PELUANG	ANCAMAN
1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi	1. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal
2. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi	2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dalam menunjang kegiatan usahanya

Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka isu strategis dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kinerja aparatur dinas
 - a. Jumlah SDM yang kurang memadai.
 - b. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan yang terbatas.
 - c. Dukungan Anggaran yang terbatas.
2. Kualitas pelayanan perizinan
 - a. Informasi peluang dan potensi investasi yang masih kurang.
 - b. Belum optimalnya tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan. Permasalahan yang dihadapi adalah Tim Teknis belum bertugas di tempat pelayanan perizinan (masih di dinas masing-masing).
 - c. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan perizinan.
 - d. Peningkatan status kelembagaan belum diikuti dengan peningkatan anggaran.
3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses perizinan
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat mengurus perizinan.

- b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan perizinan.
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan perizinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa dalam menyiapkan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten memuat indikasi belanja bagi hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Berikut disajikan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa :

Tabel T-C. 31.

Review Terhadap Rancangan Awal Renja / RKPD Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4,231,243,634					4,231,243,634	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Gowa	Persentase peningkatan jumlah investor (%)	48	40,431,600	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Gowa	Persentase peningkatan jumlah investor (%)	48	40,431,600	
1.2	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Persentase potensi pengembangan penanaman modal yang dipetakan (%)</i>	<i>100</i>	<i>40,431,600</i>	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Persentase potensi pengembangan penanaman modal yang dipetakan (%)</i>	<i>100</i>	<i>40,431,600</i>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Gowa	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota (Dokumen)	1	40,431,600	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Gowa	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota (Dokumen)	1	40,431,600	

2	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah pelaku investasi sektor unggulan (Orang)	55	184,666,800	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah pelaku investasi sektor unggulan (Orang)	55	184,666,800	
2.1	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan (Kegiatan)</i>	3	184,666,800	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan (Kegiatan)</i>	3	184,666,800	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	184,666,800	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	184,666,800	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	Persentase izin yang diterbitkan (%)	95	227,656,600	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	Persentase izin yang diterbitkan (%)	95	227,656,600	
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100		
3.1	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan (Dokumen)</i>	14000	227,656,600	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan (Dokumen)</i>	14000	227,656,600	

	<i>Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (Aduan)</i>	18		<i>yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (Aduan)</i>	18		
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha (Pelaku Usaha)	14700	216,794,300	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha (Pelaku Usaha)	14700	216,794,300	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan (Orang)	18	10,862,300	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan (Orang)	18	10,862,300	

4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Persentase perusahaan penanaman modal yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal (%)	98	576,852,250	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Persentase perusahaan penanaman modal yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal (%)	98	576,852,250	
4.1	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Perusahaan)</i>	<i>45</i>	<i>576,852,250</i>	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Perusahaan)</i>	<i>45</i>	<i>576,852,250</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)	45	136,962,250	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)	45	136,962,250	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Pelaku Usaha)	240	318,901,200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Pelaku Usaha)	240	318,901,200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (Kegiatan Usaha)	45	120,988,800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gowa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (Kegiatan Usaha)	45	120,988,800
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah (%)	100	3,201,636,384	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah (%)	100	3,201,636,384

6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja (%)	100	48,432,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja (%)	100	48,432,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	6	33,800,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	6	33,800,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	13	8,326,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	13	8,326,400	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	2	6,305,200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	2	6,305,200	
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan (%)	100	2,591,768,084	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan (%)	100	2,591,768,084	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	28	2,513,896,384	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	28	2,513,896,384	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD (Laporan)	13	77,871,700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD (Laporan)	13	77,871,700	

6.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi barang milik daerah (%)</i>	100	15,670,200	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi barang milik daerah (%)</i>	100	15,670,200	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	14	15,670,200	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	14	15,670,200	
6.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian (%)</i>	100	53,200,000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian (%)</i>	100	53,200,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	76	53,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	76	53,200,000	
6.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>	100	144,379,700	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>	100	144,379,700	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	16	8,293,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	16	8,293,700	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (Laporan)	12	10,350,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (Laporan)	12	10,350,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	125,736,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	125,736,000	
6.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah (%)</i>	<i>100</i>	<i>100,671,500</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah (%)</i>	<i>100</i>	<i>100,671,500</i>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	6	100,671,500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	6	100,671,500	

6.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	100	196,846,500	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	100	196,846,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	120,405,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	120,405,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	76,441,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	76,441,500	
6.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase jumlah barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (%)</i>	100	50,668,400	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>Persentase jumlah barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (%)</i>	100	50,668,400	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3	44,328,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3	44,328,400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	6,340,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	6,340,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan.

Untuk tahun anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa tidak mendapatkan usulan kegiatan dari dari para stakeholder di tingkat kecamatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa belum menganggarkan kegiatan yang lokasi pelaksanaannya di kecamatan. Adapun tabel yang menyajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Usulan Masyarakat dari Musrenbang Desa/Kel	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
2	Usulan Masyarakat Hibah	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
3	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
4	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				
5	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Program.....				
		Kegiatan.....				
		Sub Kegiatan.....				

TIDAK ADA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi BKPM tahun 2020 - 2024 adalah: “BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan Penanaman Modal serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu **“Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”** sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 - 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal dan;
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023, sasaran jangka menengah yang ditetapkan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
- Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPMPTSP
- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
- Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
- Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sector prioritas.

Searah dengan sasaran yang ingin dicapai pada tingkat nasional dan provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa akan melakukan strategi pembangunan yang diuraikan sesuai dengan penjabaran misi pembangunan Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu dengan menerapkan standard operational prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
2. Perlunya Reformasi Manajemen Pelayanan Perizinan termasuk lamanya waktu penerbitan dokumen perizinan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang (pengembangan sistem aplikasi berbasis IT, penyediaan sarana dan prasarana promosi) di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
4. Perlunya peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para investor (pemilik modal).
5. Mengoptimalkan tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan. Serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan perizinan.
6. Perlunya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Gowa agar investor merasa aman dan nyaman berusaha serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.
7. Mengoptimalkan Koordinasi antar OPD pemberi Pelayanan Publik.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Gowa bertugas sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan administrasi publik di bidang penanaman modal dan perizinan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Gowa sebagai Daerah yang kondusif bagi investasi. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI	CAPAIAN
				2022	2023	2024	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatkan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase nilai investasi terhadap PDRB	Persen	7 - 8	7 - 8	8 - 9	Data belum tersedia	Belum dapat dihitung
2	Sasaran : Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi	Persen	1	5	5	-32	-3200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan DPMPPTSP Kab. Gowa. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
 Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2					4,231,243,634				
2	1				4,231,243,634				4,219,984,814
2	1	2		Kab. Gowa	48	40,431,600	DAU	50	40,431,600
2	1	2	2	Kab. Gowa	100	40,431,600	DAU	100	40,431,600
2	1	2	2	Kab. Gowa	1	40,431,600	DAU	1	40,431,600

2	1	3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaku investasi sektor unggulan (Orang)	Kab. Gowa	55	184,666,800	DAU		60	184,666,800
2	1	3	2		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan (Kegiatan)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah</i>	3	184,666,800	DAU		3	184,666,800
2	1	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dalam dan Luar Daerah	3	184,666,800	DAU		3	184,666,800
2	1	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan (%)	DPMPPTSP	95	227,656,600	DAU		95	249,336,030
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%)		100				100	
2	1	4	2		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan (Dokumen)</i>	<i>DPMPPTSP</i>	14000	227,656,600	DAU		15000	249,336,030
						<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (Aduan)</i>		18				16	

2	1	4	2	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha (Pelaku Usaha)	DPMPPTSP	14700	216,794,300	DAU		15750	238,473,730
2	1	4	2	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan (Orang)	DPMPPTSP	18	10,862,300	DAU		16	10,862,300
2	1	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal (%)	Kab. Gowa	98	576,852,250	DAU & DAK		100	543,914,000

2	1	5	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Perusahaan)	Kab. Gowa	45	576,852,250	DAU & DAK		50	543,914,000
2	1	5	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)	Kab. Gowa	45	136,962,250	DAU		50	205,914,000
2	1	5	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Pelaku Usaha)	Kab. Gowa	240	318,901,200	DAK NON FISIK		120	132,000,000
2	1	5	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (Kegiatan Usaha)	Kab. Gowa	45	120,988,800	DAK NON FISIK		50	206,000,000
		1			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah (%)	DPMPTSP	100	3,201,636,384	DAU		100	3,201,636,384

		1	2		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja (%)</i>	<i>DPMPTSP</i>	100	48,432,000	<i>DAU</i>		100	48,432,000
		1	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	DPMPTSP	6	33,800,400	DAU		6	33,800,400
		1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	DPMPTSP	13	8,326,400	DAU		13	8,326,400
		1	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	DPMPTSP	2	6,305,200	DAU		2	6,305,200
		1	2		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan (%)</i>	<i>DPMPTSP</i>	100	2,591,768,084	<i>DAU</i>		100	2,591,768,084
		1	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	DPMPTSP	28	2,513,896,384	DAU		28	2,513,896,384

		1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (Laporan)	DPMPPTSP	13	77,871,700	DAU		13	77,871,700
		1	2	0	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi barang milik daerah (%)</i>	<i>DPMPPTSP</i>	<i>100</i>	<i>15,670,200</i>	<i>DAU</i>		<i>100</i>	<i>15,670,200</i>
		1	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	DPMPPTSP	14	15,670,200	DAU		14	15,670,200
		1	2	0	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian (%)</i>	<i>DPMPPTSP</i>	<i>100</i>	<i>53,200,000</i>	<i>DAU</i>		<i>100</i>	<i>53,200,000</i>
		1	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	DPMPPTSP	76	53,200,000	DAU		76	53,200,000
		1	2	0	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>	<i>DPMPPTSP</i>	<i>100</i>	<i>144,379,700</i>	<i>DAU</i>		<i>100</i>	<i>144,379,700</i>

		1	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	DPMPPTSP	16	8,293,700	DAU		16	8,293,700
		1	2	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (Laporan)	DPMPPTSP	12	10,350,000	DAU		12	10,350,000
		1	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Dalam dan Luar Daerah	12	125,736,000	DAU		12	125,736,000
		1	2	0	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah (%)</i>	<i>DPMPPTSP</i>	<i>100</i>	<i>100,671,500</i>	<i>DAU</i>		<i>100</i>	<i>100,671,500</i>
		1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	DPMPPTSP	6	100,671,500	DAU		6	100,671,500
		1	2	0	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	<i>DPMPPTSP</i>	<i>100</i>	<i>196,846,500</i>	<i>DAU</i>		<i>100</i>	<i>196,846,500</i>
		1	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	DPMPPTSP	12	120,405,000	DAU		12	120,405,000

		1	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	DPMPTSP	12	76,441,500	DAU		12	76,441,500
		1	2		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase jumlah barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>DPMPTSP</i>	<i>100</i>	<i>50,668,400</i>	<i>DAU</i>		<i>100</i>	<i>50,668,400</i>
		1	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	DPMPTSP	3	44,328,400	DAU		3	44,328,400
		1	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	DPMPTSP	10	6,340,000	DAU		10	6,340,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

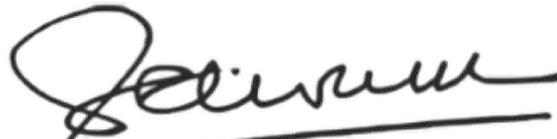
Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa yang sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Sungguminasa, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gowa,



H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19721026 199303 1 003